

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENANGANAN COVID-19 VARIAN OMICRON**

(Tesis)

Oleh

ANIS SEPTIANA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENANGANAN COVID-19 VARIAN OMICRON**

Oleh

ANIS SEPTIANA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN COVID-19 VARIAN OMICRON

Oleh

Anis Septiana

Peningkatan kasus positif Covid-19 varian omicron terbesar di Lampung terjadi di Kota Bandar Lampung, yakni 112,94 kasus per 100.000 orang per minggu pertengahan bulan februari 2022. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksin untuk pencegahan Covid-19 dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang tidak mau melaksanakan vaksin dan penularan Covid-19 varian omicron yang begitu cepat mengalami peningkatan sehingga sangat diperlukan strategi komunikasi pemerintah kepada masyarakat mengenai permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penanganan Covid-19 varian omicron dan menekan penyebaran Covid-19 varian omicron di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang memiliki kepentingan dalam proses penanganan Covid-19 serta dokumentasi secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penanganan Covid-19 yaitu membuat empat strategi yang secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi virus Covid-19. Strategi ini dihimbau untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dan terbukti efektif mampu menekan penurunan jumlah Covid-19 varian omicron di Kota Bandar Lampung dengan jumlah kasus ditahun 2021 sebesar 8.584 menjadi 6.315 kasus di tahun 2022.

Kata Kunci: Covid-19, Kota Bandar Lampung, Strategi Komunikasi.

ABSTRACT

COMMUNICATION STRATEGY OF BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19 OMICRON VARIANT

Oleh

Anis Septiana

The largest increase in positive cases of Covid-19 for the omicron variant in Lampung occurred in Bandar Lampung City, namely 112.94 cases per 100,000 people per week in mid-February 2022. The lack of public understanding of the importance of vaccines for preventing Covid-19 can be seen from the number of people who do not want to carry out vaccines and the transmission of the Covid-19 variant of the omicron which has increased so quickly that a government communication strategy is urgently needed to the public regarding this problem.

The purpose of this study was to analyze the government communication strategy carried out by the Bandar Lampung city government in an effort to handle the omicron variant of Covid-19 and suppress the spread of the omicron variant of Covid-19 in Bandar Lampung city. The research method used is descriptive qualitative with data sourced from interviews with informants who have an interest in the process of handling Covid-19 and direct documentation.

The results of the study show that the strategy adopted by the City Government of Bandar Lampung in efforts to deal with Covid-19 is to make four strategies that are consistently carried out to strengthen the physical distancing policy as a basic strategy to overcome the Covid-19 virus pandemic. This strategy is encouraged to be carried out by all the people of Bandar Lampung City and has proven to be effective in reducing the number of Covid-19 variants of the omicron in Bandar Lampung City with the number of cases in 2021 of 8,584 to 6,315 cases in 2022.

Keywords : Covid-19, Bandar Lampung City, Communication Strategy.

Judul Tesis : **Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Covid 19 Varian Omicron**

Nama Mahasiswa : **Anis Septiana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2026021011**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Pitojo Budiono M.Si
NIP.196405081993031004

Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP.196902191994032001


2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hertanto, M.Si. Ph.D.
NIP.196010101986011006

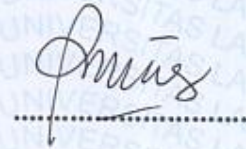
MENGENSAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Pitojo Budiono M.Si



Sekretaris : Dr. Feni Rosalia, M.Si



Anggota : Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Muhardi, M.Si
NIP.19640326 1989021 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juni 2023

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul: **Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Covid-19 Varian Omicron** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Anis Septiana
2026021011

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 12 September 1992. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Daendels dan Ibu Ira Komariah.

Almamater pendidikan penulis di antaranya: SD Negeri 2 Labuhan Ratu, SMP Kartika II Bandar Lampung, SMA Al Azhar Bandar Lampung, dan S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

Penulis kemudian melanjutkan Studi di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada tahun 2020 pada konsentrasi Manajemen Pemerintahan.

MOTTO

“Apa Yang Melewatkanku, Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku, Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku”
(Umar bin Khattab)

*“Dalam Satu hari itu tidak hanya malam selalu, matahari itu pasti terbit.
Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kebahagiaan”*
(Annisa Fitriani)

“Orang Yang Sukses Bukan Hanya Orang Yang Pintar, Tetapi Orang Yang Mau Berjuang Dengan Sungguh sungguh Itulah Orang Yang Sukses”
(Anis Septiana)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah
LangkahhambaMu, Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Tesis ini
dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Suami Terbaikku

Rahmad Dwi Prima,ST.

Yang telah menjadi Support Sistem Terbaik

Ayahanda dan Ibunda tercinta

sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana Magister
Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari
Allah SWT

Serta:

Guru dan Almamater

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Karunia dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Covid-19 Varian Omicron”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, sulit untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir Muhardi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu pemerintahan dan penguji utama pada ujian tesis ini. Terima kasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil terdahulu;
5. Bapak Dr. Pitojo Budiono M.Si Selaku Pembimbing Utama atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si Selaku Pembimbing Kedua yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Dr. Maulana Mukhlis M.I.P Selaku Penguji atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;

9. Terspesial Untuk Suamiku Rahmad Dwi Prima, ST. yang telah menjadi Support System Terbaik Untuk menggapai gelar M.I.P ini.
10. Kedua anakku Abang Ale dan Adek Chayra semoga kelak pendidikan kalian bisa lebih dari umi.
11. Kedua Ibu hebatku Oma dan Among tanpa doa kalian menjadi mustahil.
12. Kedua Ayah Hebatku Opa dan Ateh yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar tesis ini selesai.
13. Adik adik ku Annisa, David, Devia dan Darwin terimakasih untuk dukungan dan doanya.
14. Seluruh Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
15. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2020 yang selalu membantu dan mensupport dalam penyelesaian tesis ini khususon untuk mba dewi dan Acel yang sudah menjadi partner bertukar pikiran selama dikampus.

Bandar Lampung, Juni 2023

Anis Septiana

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Corona Virus Disease (Covid-19)	12
2.2. Strategi Komunikasi Pemerintah.....	13
2.2.1. Komunikasi	13
2.2.2. Teori Komunikasi Lasswell (1960)	15
2.2.3. Strategi Komunikasi.....	17
2.2.4. Strategi Komunikasi Pemerintah Upaya Penanganan Covid 19	19
2.2.5. Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19.....	21
2.3. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Pemilihan Informan.....	29
3.3. Fokus Penelitian	30
3.4. Sumber Data.....	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Teknik Analisis Data	31
3.7. Keabsahan Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM	34
4.1. Profil Kota Bandar Lampung	34
4.2. Topografi Kota Bandar Lampung	37
4.3. Virus Covid-19.....	38
4.4. Strategi Penanganan Covid-19	39

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1. Strategi Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Upaya Penanganan Covid-19 Varian Omicron.....	43
5.1.1. Who?(Siapakah komunikatornya) (<i>Communicator, Sender</i>)	43
5.1.2. Says what? (pesan apa yang dinyatakan) indikator: Nilai, Gagasan atau maksud dari sumber	49
5.1.3. <i>In which Channel?</i> Media apa yang digunakan (bentuk pesan dari cara penyajian pesan)	53
5.1.4. <i>To Whom?</i> (<i>destination, audience</i>)	61
5.1.5. <i>With what Effect</i> (Umpan Balik (<i>Effect, Impact, Feedback</i>)).....	63
5.2. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Dalam Penanganan Covid 19 Varian Omicron Mampu Menekan Penyebaran Covid 19 di Kota Bandar Lampung	65
 BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	80
6.1. Simpulan	80
6.2. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Kasus Covid-19 Tahun 2021-2022	1
2. Kasus Covid -19 Varian Omicron Terbesar di Asia 12 Januari 2022.....	3
3. Jumlah Kasus Covid19 Varian Omicron, Januari 2022	3
4. Informan Penelitian.....	29
5. Data Covid 18 Maret 2020-19 Oktober 2022.....	38
6. Data Covid Tahun 18 Maret 2020- 21 Mei 2023	72
7 Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung	74

DAFTAR GAMBAR

1. Kasus Covid-19 di Provinsi Lampung (31 Januari 2022).....	4
2. Jumlah Terkonfirmasi Positif Di Kabupaten Kota Provinsi Lampung	5
3. Kerangka Pemikiran.....	27
4. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung.....	36
5. Tim BPBD Melakukan Sosialisasi di Caffe	46
6. Pemerintah Melakukan Tracking di Caffe	52
7. Tim Satgas Covid-19	58
8. Rencana Stategis Pemerintah Kota Bandar Lampung	66
9. Stategi Komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung	68
10. Grafik Jumlah Kasus Covid 19 Kota Bandar Lampung.....	73
11. Grafik Perkembangan Kasus Kumulatif Covid 19 Kota Bandar Lampung.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian aktivitas masyarakat dilumpuhkan oleh pandemi covid-19, Covid-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, (Mona, 2020), hal tersebut menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian di seluruh dunia, masing-masing negara merespon dan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani covid-19 (Limilia, P & Pratamawaty, B., 2020).

Berdasarkan data covid-19 di Indonesia sejak tahun 2021 total kasus mencapai 4,26 juta orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan 102.000 orang meninggal dunia serta jumlah kasus pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022. (*COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering*, 2022).

Tabel 1. Jumlah Kasus Covid-19 Tahun 2021-2022

Tahun	Total Kasus Covid-19	Kasus Meninggal	Sembuh
2021	4,26 juta	102 rb	4,16 Juta
2022	6,04 Juta	156 rb	5,88 Juta

Sumber: covid.id, 2022

Dengan meningkatnya kasus virus Covid-19 diperlukan pedoman dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan penyebaran. Penanganannya berdampak pada perubahan di berbagai bidang kehidupan seperti perubahan sosial, kekhawatiran dan ketakutan dikalangan masyarakat akibat proses penyebarannya yang begitu cepat. Telah banyak dilakukan diskusi, pengujian dan kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Pemerintah dihibau oleh masyarakat untuk lebih tegas dan cepat tanggap dalam upaya memerangi wabah Covid-19 yang semakin meluas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah juga harus menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta koordinasi di antara mereka. Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan edukasi, edukasi tersebut ditujukan kepada masyarakat agar semua pihak dapat terlibat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Kunci penting dalam menghadapi Covid-19 adalah sikap dan apresiasi terhadap informasi yang mengarah pada partisipasi masyarakat (Sulhan, 2020).

Mengingat urgensi pandemi covid-19, percepatan penanganan Covid-19 menjadi penting karena PSBB juga harus segera dilaksanakan. UU No. 6 Tahun 2018 mengenai karantina kesehatan, terdapat opsi yang perlu diambil seperti PSBB, Karantina melalui penataan wilayah, penataan tempat tinggal dan dilakukan pembenahan dalam menata orang, barang dan alat angkut agar logistik dapat berjalan dengan lancar dan aman. Masyarakat diharapkan mampu merubah perilaku sebelum makan untuk mencuci tangan, dan mulai hidup bersih dan sehat (PHBS).

Saat itu pemerintah belum merencanakan strategi penyampaian informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat dan mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah sejak awal lebih fokus pada kepentingan ekonomi akibat pandemi, bukan pada penanganan Covid-19 itu sendiri (Almuttaqi, 2020).

Terhitung per 12 Januari 2022 sebanyak 326 kasus terlapor Covid-19 varian omicron yang menyebabkan Indonesia menjadi peringkat keenam di Kawasan Asia dari 7.819 kasus Covid-19 varian omicron (B.1.1.529) yang telah dinyatakan oleh Laporan *Global Initiative on Sharing ALL Influenza Data* (GISAID).

Tabel 2. Kasus Covid -19 Varian Omicron Terbesar di Asia 12 Januari 2022

No	Negara	Kasus Varian Omicron
1	Israel	3387
2	India	810
3	Turki	748
4	Singapura	715
5	Jepang	685
6	Indonesia	326
7	Thailand	234
8	Malaysia	133
9	Rusia	89
10	Hongkong	77

Sumber: GISAID, 2022

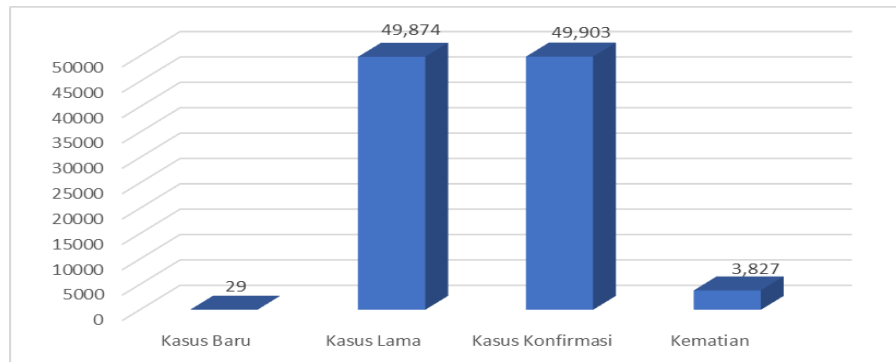
Dari total kasus tersebut tercatat sebesar 45% yaitu Inggris mendominasi kasus varian baru covid-19 Omicron. Penyebab utama dari varian omicron tersebut adalah Wisatawan Luar Negeri (PPLN), untuk itu masyarakat dihimbau oleh Kementerian Kesehatan untuk menunda perjalanan ke luar negeri.

Tabel 3. Jumlah Kasus Covid19 Varian Omicron, Januari 2022

Wilayah	Jumlah Terkonfirmasi Varian Omicron	Total
DKI Jakarta	80,1% perjalanan luar negeri dan 17,9% penularan lokal	498 Orang
Bandung	100% penularan luar negeri	4 Orang
Tangerang	25% perjalanan luar negeri dan 75% local	4 Orang
Malang	100% penularan luar negeri	3 Orang
Bogor	100% penularan luar negeri	1 Orang
Surabaya	100% penularan luar negeri	1 Orang
Medan	100% penularan luar negeri	1 Orang

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 3 terdapat tujuh wilayah dengan kasus terdeteksi Covid-19 varian omicron. Kasus pertama Covid-19 varian omicron di Surabaya, ditemukan pada 2 Januari 2022. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara khusus mengumumkan kasus pertama omicron pada warga Medan, sehingga sudah ada 7 wilayah yang terjangkit varian omicron dari Covid-19.

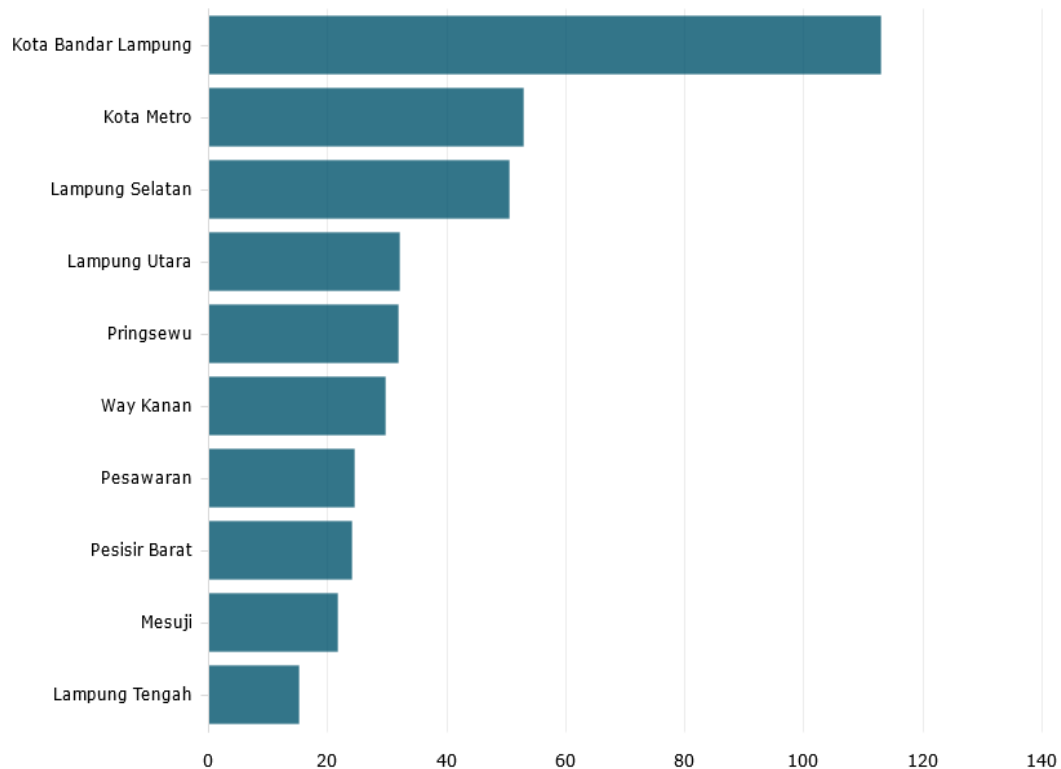


Sumber: Covid19.lampungprov.go.id, 2022

Gambar 1. Kasus Covid-19 di Provinsi Lampung (31 Januari 2022)

Gambar 1 menunjukkan bahwa masih terdapat pemabahan kasus baru sebesar 29 orang, jumlah kematian akibat Covid-19 sebanyak 3.827 orang dan total kasus konfirmasi sebanyak 49.903 orang. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi untuk mengantisipasi Gelombang 3 dan varian omicron di Provinsi Lampung dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit se-Provinsi Lampung, dalam pertemuan tersebut dibahas strategi Provinsi Lampung dalam menghadapi gelombang 3 varian omicron di Provinsi Lampung.

Pada prinsipnya protokol kesehatan harus terus ditegaskan, selain itu juga mendukung *tracking* dan *tracing*. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung secara rutin mengirimkan Whole Genome Sequencing (WGS) pasien positif Covid-19 untuk mengetahui mutasi gen khususnya pada varian omicron.



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2022

Gambar 2. Jumlah Terkonfirmasi Positif Di Kabupaten Kota Provinsi Lampung

Penambahan kasus positif Covid-19 tertinggi di Lampung terjadi di Kota Bandar Lampung dengan 112,94 kasus per 100.000 penduduk per minggu pada Selasa, 15 Februari 2022. Angka tersebut naik dua kali lipat dari jumlah kasus yang tercatat. Angka penularan Covid-19 di Kota Bandar Lampung relatif tinggi dibandingkan kondisi pecan sebelumnya karena tidak ada laporan kasus per 100.000 penduduk per minggu. Selanjutnya di posisi kedua adalah kota Metro. kota ini mencatat angka terkonfirmasi mingguan sebesar 52,8 kasus per 100.000 penduduk. Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 pekan ini terlihat lebih tinggi dibandingkan pekan lalu yang tidak ada laporan kasus.

Masih di lima besar selain dua daerah di atas adalah Lampung Selatan, Lampung Utara dan Pringsewu. Masing-masing tercatat konfirmasi mingguan sebanyak 50,54 kasus, 32,09 kasus dan 31,76 kasus. Menurut daftar Kementerian Kesehatan, lima kabupaten/kota berikutnya yang masuk dalam 10 besar adalah Pesawaran, Pantai Barat, Mesuji, dan Lampung Tengah. Wilayah tersebut

mencatat peningkatan rata-rata lebih dari 15,26 kasus per 100.000 penduduk. Selain itu, ada tujuh kabupaten/kota di Indonesia yang menurut perkembangan terakhir belum melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19 per 100 ribu penduduk per minggu.

Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga situasi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi telah mendorong beberapa pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya.

Menurunnya kegiatan tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat rentan dan miskin. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengumumkan berbagai kebijakan untuk memerangi penyebaran Covid-19 dan memitigasi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini.

Sangat perlu dilakukan pemantauan terhadap penerapan berbagai strategi tersebut dan mengetahui efektivitasnya. Penurunan output ekonomi Lampung terjadi setelah triwulan I-2020, dengan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,74% (year-on-year) pada triwulan I-2020, sebelum kembali turun signifikan pada triwulan II tahun 2020 sebesar -3.57% (year-on-year). Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi yang juga terjadi secara global dapat menjadi stimulus bagi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung untuk berbenah dan mengejar ketertinggalan. Reformasi ekonomi yang mendasar melalui transformasi, menerapkan strategi pemulihan yang tepat, dan mempersiapkan masa depan dalam krisis serupa untuk semua bisnis dan pemerintah adalah kunci untuk memperkuat pembangunan ekonomi.

Sebagai lembaga penelitian yang fokus pada kajian masalah sosial ekonomi, *The SMERU Research Institute* telah melakukan beberapa penelitian baik di tingkat nasional maupun daerah di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan

politik terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap perekonomian. Efek pertama yang sangat terlihat dan mudah dikenali adalah melemahnya konsumsi rumah tangga, atau melemahnya daya beli masyarakat, hal ini penting dari segi ekonomi. Selama ini masyarakat mengalami kerugian daya beli yang sangat besar. Bagian integral kedua yang sangat terlihat dari perekonomian nasional adalah menurunnya tingkat investasi di berbagai sektor perekonomian. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Husna Ni'matul Ulya (2020) dengan judul *Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19*. yang menunjukkan bahwasanya hasil Penelitian menghasilkan fomulasi dengan memaksimalkan pengembangan kawasan agropolitan dengan penguatan regulasi serta perluasan kawasan agropolitan ke wilayah/kota lain, dan memanfaatkan media online di dalam pelaksanaan termasuk sistem pemasaran produk dari kawasan agropolitan ini meskipun sedang dalam masa pandemi.

Ketidakpastian akibat pandemi membuat banyak orang, termasuk pengusaha, enggan memulai investasi. Dampak ketiga adalah melemahnya perekonomian lokal dan nasional. Penurunan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional selama masa pandemi. Dampak keempat adalah perubahan pola bisnis dan adopsi model bisnis yang tidak biasa. Keterbatasan akses pertemuan masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan bisnis/ekonomi, telah mengubah model bisnis saat ini.

Dampak pandemi Covid-19 yang paling terasa adalah pada kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat umum harus mengikuti semua anjuran pemerintah untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak setiap saat. Hal ini tidak lain adalah upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Dilarang berkumpul dengan orang banyak karena dapat menjadi sumber penyebaran virus Covid-19.

Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Apalagi setelah varian baru Omicron yang penyebarannya lebih cepat dari varian sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi trigger warning bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut.

Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku memerlukan strategi yang terintegrasi dan tertata. Selain itu, diperlukan koordinasi yang solid hingga tercapailah tujuan tersebut. Untuk menjangkau seluruh masyarakat Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku melakukan kolaborasi dengan pemerintah, media, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan instansi untuk membantu mensosialisasikan protokol kesehatan 3M.

Berdasarkan hal tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M. Dalam melakukan sosialisasi diperlukan komunikasi yang sifatnya mengajak dan membujuk.

Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku memerlukan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi, membujuk masyarakat. Selain itu diperlukan strategi atau perencanaan yang matang agar informasi tentang menerapkan protokol kesehatan 3M dapat tersampaikan dan diimplementasikan kepada seluruh masyarakat.

Komunikasi persuasif menjadi poin penting dalam menjalankan rencana strategi yang telah disusun Pemerintah Kota Bandar Lampung Bidang Perubahan Perilaku untuk mengubah kebiasaan hidup masyarakat selama pandemi ini. Ketika kekuatan pemerintah meningkat selama keadaan darurat kesehatan masyarakat nasional, komunikasi pemerintah yang efektif menjadi semakin penting untuk memerangi pandemi dan menstabilkan masyarakat (Huang C., dkk, 2020).

Komunikasi pemerintah yang efektif memainkan peran utama dalam menginformasikan khalayak publik utama (termasuk penanggap pertama, kelompok dengan risiko terbesar, penyedia layanan kesehatan/ pejabat kesehatan, perwakilan media, personel penegakan hukum, dan masyarakat umum) tentang ancaman yang akan datang, dan praktik terbaik untuk meminimalkan bahaya selama keadaan darurat. Hal ini melibatkan komunikasi internal pemerintah di dalam dan di antara lembaga pemerintah dan komunikasi eksternal dengan publik,

media, dan organisasi lain, serta dengan perwakilan negara lain yang memiliki risiko kesehatan serupa.

Keterkaitan kelompok dan organisasi yang berbeda, komunikasi pemerintah harus sangat efektif dan terkoordinasi dengan baik untuk memberikan informasi dan nasihat terbaik yang tersedia untuk membantu mengelola pandemi. Jika para pemimpin pemerintah tidak berkomunikasi secara efektif dalam menanggapi ancaman kesehatan masyarakat di tingkat daerah, nasional, dan global, masyarakat pasti menjadi kacau dan anarkis.

Hal ini karena masyarakat mengalami ketakutan dan ketidakstabilan karena terbatasnya informasi dan rekomendasi yang dapat diandalkan untuk menanggapi krisis secara bermakna. Tampaknya banyak dari jenis kegagalan komunikasi pemerintah telah terjadi selama tanggapan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Berdasarkan kerangka teori Lasswell, penelitian ini menganalisis komunikasi pemerintah selama pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi untuk menetapkan strategi komunikasi risiko kesehatan yang efektif dengan publik.

“Keberhasilan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi dianggap panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk bisa sampai pada hal yang diinginkan strategi komunikasi bisa mengarahkan cara kerja operasional apa taktik yang harus digunakan, ini sebagai pendekatan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu dan itu bisa dilihat dari kondisi” (Ekalista, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hestiana (2020) dengan judul *penelitian Strategi Komunikasi Humas Pemkot Dalam Upaya Menanggulangi Kasus Virus Corona (Covid-19) Di Kota Surakarta Pada Periode Maret 20 Juni 2020* yang menunjukkan bahwasanya Humas Pemkot Surakarta dalam menjalankan tugas kehumasan sebagai fungsi komunikasi pimpinan juga terlibat dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Surakarta. Melalui perencanaan, pelaksanaan seperti pemilihan komunikator, pengelolaan pesan, pelaksanaan penggunaan dan kegiatan media baik media konvensional maupun

media online, serta kegiatan konferensi pers, dan komunikasi baik publik internal yakni pegawai yang bekerja di balaikota serta publik eksternal yakni seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kota Surakarta. Selain itu ada kegiatan evaluasi dimana Humas Pemkot Surakarta mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan khususnya dalam melakukan komunikasi. Humas Pemkot Surakarta berusaha untuk mengkaji ulang apakah strategi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Surakarta melalui komunikasi sudah sesuai dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Dalam artian strategi komunikasi pemerintahan sangatlah penting sekali untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung juga banyak melakukan strategi komunikasi koersif berupa instruksi dan penutupan beberapa tempat kegiatan yang memungkinkan banyak orang berkumpul seperti *car free day* dan juga menutup sekolah dan tempat warkop. Melakukan strategi komunikasi saat menghimpun kebijakan untuk menggalakkan kerja sama pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya.

Selain strategi komunikasi koersif, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menggunakan teknik kanalisasi, informatif dan edukatif, untuk memberikan pemahaman yang sama dengan pemerintah kota dan jajarannya, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi penutupan kegiatan belajar mengajar, wisata atraksi dan juga memberikan informasi melalui pusat informasi informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penularan virus Covid-19 di lingkungannya. Permasalahan tersebut tentunya memerlukan strategi membangun pola komunikasi dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah untuk memahami bahaya Covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 varian omicron di kota Bandar Lampung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi komunikasi Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penanganan Covid-19 varian omicron?
2. Apakah strategi komunikasi Pemerintah Kota dalam penanganan Covid 19 varian omicron menekan penyebaran covid 19 di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penanganan Covid-19 varian Omicron.
2. Untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah kota dalam penanganan Covid 19 varian omicron menekan penyebaran Covid 19 varian omicron di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan terkait strategi komunikasi dalam menghadapi Covid-19 varian omicron.
- 2) Dapat dijadikan sebagai masukan tentang penanganan Covid-19 varian omicron dengan pendekatan strategi komunikasi pemerintah.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat.
- 2) Dapat dijadikan masukan bagi peneliti lain untuk melihat strategi komunikasi pemerintah daerah dalam pencegahan Covid-19 varian omicron di daerah lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Covid-19 adalah virus dalam keluarga coronavirus yang menyebabkan penyakit menular dan mematikan yang dapat menginfeksi manusia dan mamalia lainnya melalui saluran pernapasan, mengalami sakit tenggorokan, pilek bahkan batuk, bahkan dapat menyebabkan gejala awal pneumonia. Virus dapat menyebar melalui cairan pernapasan dan kontak dekat dengan penderita Covid-19 (Yunus dan Rezki, 2020). Covid-19, juga biasa dikenal sebagai coronavirus, adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan kematian akibat penyakit pernapasan dan pneumonia akut. Ini adalah jenis virus baru yang dapat menginfeksi manusia. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Virus tersebut bernama Covid-19 dan pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat, menyebar ke bagian lain China bahkan ke banyak negara, termasuk Indonesia (Sarmigi, 2020). Asal usul virus corona pertama kali muncul di pasar hewan peliharaan dan makanan laut Wuhan. Sejak itu, banyak pasien dilaporkan terinfeksi virus ini. Ini ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut. Hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam biasa dijual di pasar. Virus ini diyakini berasal dari kelelawar. Diduga juga penyebaran virus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia (Sarmigi, 2020).

Munculnya infeksi corona memiliki banyak implikasi. Tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang

menyebabkan Covid-19 semakin memukul ekonomi global. Banyak pabrik dan departemen lain menghadapi kesulitan sebagai akibat dari epidemi ini. Akibatnya, pemerintah telah menutup semua kegiatan di luar ruangan untuk mencegah penyebaran virus ini. Wisatawan juga harus memakai alat pelindung diri seperti masker (Sarmigi, 2020).

Pemerintah juga melakukan isolasi sosial untuk mengurangi dampak dari kebijakan yang dikeluarkan, dan pemerintah juga melakukan serangkaian persiapan yang intensif untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah harus fokus menghentikan penyebaran Corona. Pemerintah juga memberikan dukungan termasuk kenaikan PKH, kartu sembako, penambahan kartu pra kerja, keringanan biaya utilitas, unit perawatan intensif, pajak, dan banyak lagi (Sarmigi, 2020).

2.2. Strategi Komunikasi Pemerintah

2.2.1. Komunikasi

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Aktivitas komunikasi akan muncul jika seorang manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi muncul sebagai akibat dari adanya hubungan sosial. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok (Ponco, 2018). Komunikasi adalah peristiwa menyampaikan gagasan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan dan sebagainya melalui lambang atau lambang yang dapat menimbulkan efek perilaku yang dilakukan dengan media tertentu.

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia, karena dengan mengkomunikasikan segala sesuatu dan tujuan seseorang dapat tercapai. Komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata dari mulut, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan dengan media dan aspek lain di luar penggunaan kata-kata yang dihasilkan oleh mulut manusia (Herlina, 2016). Dalam menyampaikan suatu pesan, seorang komunikator

harus mampu menciptakan komunikasi yang efektif agar menimbulkan efek yang diinginkan komunikasikan.

Agar pesan yang disampaikan kepada sasaran (publik) efektif, ada beberapa strategi komunikasi menurut (Arifin, 2008)

- 1) Mengetahui Khalayak
- 2) Menyusun Pesan
- 3) Menetapkan Metode
- 4) Seleksi dan Penggunaan Media

Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, seorang komunikator harus memikirkan cara agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat mulai dari cara penyampaian pesan, media yang digunakan dalam menyampaikan pesan, dan sebagainya (Sapril, 2011):

- 1) Pengirim Pesan atau Komunikator (*Communicator, Source, sender*).
- 2) Pesan (*message*).
- 3) Media (*channel*).
- 4) Penerima Pesan atau Komunikan (*Communicant, Communicate, Receiver, Recipient*).
- 5) Efek atau Umpan Balik (*Effect, Impact, Influence, Feedback*).

Komunikasi pemerintah adalah komunikasi publik tentang gagasan, program, dan gagasan pemerintah dalam kaitannya dengan perwujudan bangsa. Dalam hal ini pemerintah dapat disamakan dengan komunikator dan masyarakat dengan komunikator, tetapi dalam suasana tertentu masyarakat dapat menyampaikan ide dan gagasan dan pemerintah dapat mengamati apa yang terjadi. keinginan orang. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dan bahkan menanggapi permintaan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku (Mulawarman dan Rosilawati, 2014)

2.2.2. Teori Komunikasi Lasswell (1960)

Lasswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society* (Lasswell, 1960:43), mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: “*Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect*” atau “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya”.

Paradigma Lasswell (1960:43) di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni:

a. *Who?* (Siapakah komunikatornya) (*Communicator, Sender*)

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber sering disebut sender, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut source.

ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang komunikator, hal tersebut antara lain kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Pemilihan komunikator dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah satgas covid 19 kota Bandar Lampung serta tenaga kesehatan yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan sehingga ucapannya dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Mereka merupakan orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tertib protokol kesehatan.

b. *Says what?* (pesan apa yang dinyatakan) indikator: Nilai, Gagasan atau maksud dari sumber.

Pesan merupakan gagasan atau ide yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk tujuan tertentu Pesan yang disampaikan bisa berupa nasihat, perintah, permintaan yang disampaikan secara verbal atau pun non verbal, terselubung atau bahkan terang-terangan. Sebagaimana dijelaskan komunikator harus memerhatikan kondisi psikologis dan sosiologis

masyarakat yang akan dijadikan sebagai komunikan. Berhubungan dengan itu, relevansi pesan dengan keadaan komunikasi harus memerhatikan strategi penyampaian pesan; baik dengan membuka forum interaksi, diskusi, terbuka atau terselubung dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pesan dibagi dua bagian;

- Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk kata-kata/ucapan, berisi informasi baik berupa ucapan atau tulisan.
- Pesan non verbal adalah pesan yang berupa atau disampai dalam rupa atau tubuh (tidak diucapkan); *facial expression* (ekspresi wajah), dll.

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi nasihat atau propaganda. Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content atau information.

- c. *In which Channel?* Media apa yang digunakan (bentuk pesan dari cara penyajian pesan).

Media merupakan alat atau sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Tipe media komunikasi politik yang bisa diakses adalah:

- Komunikasi massa komunikasi ini menggunakan media yang diakses oleh masyarakat secara umum seperti koran, televisi, radio.
- Komunikasi interpersonal berhubungan secara langsung dengan tatap muka (dialog, rapat umum, dll).
- Komunikasi organisasi komunikasi organisasi bisa dilakukan melalui konvensi, sidang, dll. karena komunikasi organisasi organisasi adalah hubungan antar dalam organisasi baik secara vertikal (atasan kebawahan) maupun horizontal (staf dengan staf).

Media yang dimaksud disini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.

d. *To Whom? (destination, audience)*

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai atau Negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak ada sumber. Komunikan atau receiver adalah penerima informasi – perseorangan atau kelompok- yang dijadikan objek oleh komunikator. Komunikan akan memberikan umpan balik pada komunikator. Komunikan juga diartikan sebagai pihak yang pasif dan menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah Kualitas pesan, maksudnya pesan yang disampaikan harus diukur dengan mengkaji terlebih dahulu komunikan agar pesan bisa diterima oleh komunikan.

e. *With what Effect (Umpan Balik (Effect, Impact, Influence, Feedback)*

Efek atau pengaruh adalah perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. Bisa dilihat dari perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang.

2.2.3. Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi Seta (2014), strategi komunikasi dapat dibagi menjadi tiga teori utama. Anda dapat mengarahkan, melihat produk, menjelajahi, dan memasuki jaringan. Kedua adalah strategi dorong. Strategi komunikasi ini berfokus pada kinerja karyawan. Strategi ini mengarah pada realisasi kekuatan yang menumbuhkan loyalitas dan kemauan untuk bekerja. Ketiga, pull strategy, strategi komunikasi untuk menumbuhkan citra perusahaan, dan prosesnya

bertujuan untuk menjaga hubungan dan relasi dengan pelanggan. Berkenaan dengan hal tersebut, strategi komunikasi didefinisikan sebagai rencana dan taktik yang digunakan untuk memperlancar komunikasi dengan menunjukkan pengirim, pesan, dan penerima dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, semuanya berkaitan dengan metode (Muhammad, 2008).

Semua strategi komunikasi merupakan keputusan kontingen tentang tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Ini berarti bahwa ketika mengembangkan strategi komunikasi Anda, Anda perlu mempertimbangkan kondisi dan situasi yang Anda hadapi dan mungkin hadapi di masa depan untuk mencapai perubahan audiens yang efektif. Strategi komunikasi memungkinkan tindakan komunikasi dilakukan pada target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan. Kegagalan komunikasi terjadi ketika gangguan mengganggu salah satu komponen komunikasi dan proses komunikasi tidak efektif. Hambatan komunikasi, di sisi lain, adalah hambatan yang mencegah proses komunikasi berlangsung seperti yang diharapkan, *communicant* (Cangara, 2017).

Strategi komunikasi memiliki dua aspek dalam pemahamannya yakni secara makro dan secara mikro. Dalam konteks formal dan terencana secara kelembagaan banyak makna dari Implementasi sebuah program strategi komunikasi yang bisa dilihat dan diambil manfaatnya atau bahkan di jadikan contoh untuk orang lain. Kemudian orang lain itu merasa sesuai dan bisa mengadaptasikan dengan baik dalam lingkungan manajemen dalam kelembagaan tersebut. Dengan demikian strategi komunikasi adalah merupakan perpaduan dari sebuah perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi guna untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam setiap upaya menggapai tujuan tersebut, komunikasi harus mampu menggambarkan bagaimana tata cara pelaksanaannya secara tepat, dalam arti kata bahwa pendekatan bias berubah sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi memiliki peran sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia atau komunikasi dalam skala besar.

Melalui program-program baru atau ide-ide baru. Adapun tujuan dari strategi komunikasi pada umumnya ialah untuk menkomunikasikan gambaran tentang

Visi dan Misi dari lembaga atau organisasi terkait, melalui sebuah sistem tujuan utama dan kebijakan. Strategi menggambarkan sebuah arah yang didukung oleh berbagai sumber daya yang ada. Sementara teori dari R. Wayze dkk. Menyebutkan ada tiga tujuan dari strategi komunikasi, yaitu :

- a. *To secure understanding*, memastikan pesan telah diterima oleh komunikan.
- b. *To establish acceptance* menetapkan penerima pesan.
- c. *To Motivate action*, tindakan dimotivasi.

Dimana dalam strategi komunikasi, komunikator harus membuat rencana yang akan digunakan untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. George R. Terry menjelaskan 4 sub dalam strategi komunikasi:

1. Perencanaan (*planning*) adalah aktivitas menetapkan sasaran dan tindakan untuk mencapai tujuan. Tindakan ini meliputi apa, kapan, bagaimana, dimana, siapa, untuk siapa dilakukan komunikasi.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah kegiatan membagi pekerjaan diantara komponen-komponen aktivitas dikalangan anggota.
3. Penggiatan (*actuating*) adalah upaya merangsang para anggota untuk melaksanakan tugas.
4. Pengawasan (*controlling*) adalah tindakan mengkaji apakah kegiatan yang dilakukan para anggota sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa komunikasi yang dilakukan komunikator selaras dengan tujuan yang ditetapkan.

2.2.4.Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Upaya Penanganan Covid 19

Pengembangan strategi adalah tentang membangun visi dan misi kota Anda, menentukan strategi dan pendapatan daerah Anda, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mempersiapkan langkah selanjutnya untuk memberikan proses layanan terbaik. Mengembangkan strategi melibatkan beberapa langkah: 1. Menentukan lingkungan yang akan diciptakan pemerintah di

masa depan dan misi pemerintah untuk mencapai visi yang disyaratkan oleh lingkungan tersebut. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi pemerintah dalam memenuhi misi mereka. 3. Mengembangkan faktor kunci keberhasilan untuk strategi yang dirancang berdasarkan tujuan analitis sebelumnya dan menemukan strategi alternatif yang berbeda dengan mempertimbangkan sumber dan kondisi yang tersedia. 5. Memilih Strategi yang Paling Tepat untuk Mencapai Tujuan Jangka Pendek dan Jangka Panjang Dari definisi yang telah dijelaskan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. pemantauan. Selain itu, menggambarkan pola respon terhadap virus Covid-19 dan langkah-langkah spesifik yang diambil pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di era new normal.

Komunikasi pemerintah adalah komunikasi antara orang-orang yang berlangsung dalam konteks organisasi pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari konteks komunikasi organisasi dan juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Aliran pesan masuk dan keluar terjadi melalui jaringan yang saling bergantung menurut aturan formal. Pesan yang dikirim dan diterima tidak hanya berupa informasi, tetapi juga penyebaran ide (*sharing ideas*), instruksi (*instructions*), atau emosi (*feelings*).

Komunikasi pemerintah untuk manajer adalah komunikasi internal organisasi untuk membantu karyawan atau karyawan mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana, dan untuk memastikan bahwa pemerintah memperoleh informasi dari karyawan tentang hasil kinerja yang berguna yang dimaksudkan untuk diterima dan dicapai. tujuan pemerintah secara efektif dan efisien. Komunikasi pemerintah untuk mengelola orang menyediakan dan memperoleh informasi dari berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah kepada organisasi non-pemerintah publik, termasuk pemerintah daerah dan badan bisnis, untuk merumuskan kebijakan komunikasi eksternal organisasi. Pedoman yang diadopsi. Dengan memutuskan apakah suatu kebijakan atau keputusan akan dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau diputuskan (Djopari & Solihah, 2014).

Sebuah model umum untuk proses komunikasi yang diprakarsai oleh pengirim (administrator atau administrator pemerintah) mencoba untuk berkomunikasi dengan pejabat, masyarakat umum, dan organisasi lainnya. Untuk alasan ini, satu set informasi dipilih sebagai pesan yang akan dikirim (ide). Ketika pengirim ingin mengirimkan informasi, pengirim mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk kata-kata, huruf, atau simbol yang sesuai sehingga penerima akan dengan mudah menerima dan berharap dapat mempengaruhi orang lain. Suatu gagasan atau ungkapan gagasan dalam bentuk verbal (lisan dan tulisan) atau non-verbal (kata-kata pemerintah, ekspresi wajah, gerak tubuh atau gambar) disebut pesan. Pesan yang disampaikan dapat berupa kebijakan, prosedur, peraturan, dan keputusan.

Oleh karena itu, komunikasi pemerintah pada dasarnya adalah proses penyebaran dan berbagi informasi di dalam dan di luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintah, pejabat pemerintah bertukar dan berbagi informasi dengan orang lain, khususnya badan legislatif bisnis, karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Melalui komunikasi, pejabat pemerintah, manajer dan manajer pemerintah dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap, pemahaman, dan perilaku karyawan dan masyarakat mereka. Oleh karena itu, semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai pengirim maupun penerima, merupakan bagian dari proses komunikasi pemerintah.

2.2.5. Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Pada Desember 2019, kasus pneumonia yang tidak diketahui dilaporkan untuk pertama kalinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat, menyebar ke berbagai provinsi di China, dan dalam waktu kurang dari sebulan telah menyebar ke Thailand dan Korea Selatan. 11 Februari 2020, Jurnal Kesehatan Dunia *Medica Malahayati*, Volume 4, Edisi 3, 195 Juli 2020, Organisasi (WHO) telah mengganti nama penyakit menjadi virus corona yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Mengumumkan penyakit virus (Covid-19) Sebelumnya bernama 2019-nCoV dan dinyatakan sebagai pandemi pada 12 Maret 2020 (Thorik, 2020). Covid-19 saat ini menjadi perhatian utama dunia. Dengan percepatan penyakit, kasus juga meningkat di Indonesia, dengan

manifestasi klinis yang berbeda dari Covid-19 muncul ketika sistem kesehatan runtuh (Yunus & Rezki, 2020).

Sejak kasus pertama diumumkan, pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19. Di bidang pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 132 rumah sakit rujukan dengan 40.829 tempat tidur yang dikhususkan untuk penanganan pasien Covid-19. Selain itu, 40.320 dokter spesialis bersiaga untuk merawat pasien Covid-19 yang tersebar di 2.877 rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah terus berupaya memberikan pengobatan yang tepat bagi pasien corona. Pemerintah telah memesan 2 juta obat Avigan setelah sebelumnya memesan 5.000 obat yang sama. Selain Avigan, pemerintah juga telah memesan 3 juta dosis klorokuin (Kemenkes RI, 2020).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Keputusan status ini terkait dengan meningkatnya jumlah kasus virus corona di negara tersebut. Selanjutnya, pada 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan pandemi virus corona sebagai bencana nasional. Keputusan ini diambil dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bahaya Non Alam Tentang Perbanyakan. Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional (BNBP RI, Tahun Presiden 2020 Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional). Perintah eksekutif tersebut menyebutkan bahwa penanganan bencana nasional akibat virus corona akan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sementara itu, gubernur, bupati, dan walikota akan memimpin gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di tingkat daerah (BNBP RI, Presiden 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional). Pemerintah telah menyiapkan tiga strategi untuk menahan penyebaran Covid-19. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia (KSP, 2020):

1. Perubahan perilaku dan deteksi dini penyebaran Covid-19. Strategi ini mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan melalui kampanye protokol kesehatan masyarakat yang sistematis yang melibatkan berbagai

kelompok, tindakan legislatif untuk menegakkan protokol kesehatan, dan mendorong pengujian dan pelacakan kebijakan yang ditargetkan.

2. Pembangunan pusat kontrol dan isolasi yang terdiri dari fasilitas yang didedikasikan untuk pasien simtomatik dan ringan untuk mencegah kepadatan rumah sakit dan penularan ke keluarga. Setiap kota berkualitas tinggi kemudian menawarkan fasilitas yang wajar dengan fasilitas yang wajar untuk menangani OTG dan gejala ringan.
3. Penatalaksanaan respons Covid-19 menggunakan protokol standar untuk terapi perawatan pasien. Dalam hal ini, Jodi menambahkan, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim yang terdiri dari lima asosiasi profesi dan rumah sakit BUMN. Kami kemudian memastikan bahwa setiap rumah sakit rujukan memiliki tempat tidur, perbekalan kesehatan, dan peralatan yang memadai untuk menjalankan protokol.

Dalam rangka menekan penyebaran virus corona, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Massal Terkait Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Turunan dari PP 21/2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyebaran Pembatasan Sosial Terkait Percepatan Penanggulangan Penyakit Virus Corona 2019 (Yunus & Rezki, 2020).

Kebijakan pembatasan sosial juga didukung oleh empat strategi yang dikembangkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menahan penyebaran pandemi Covid-19: Untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19, didukung oleh empat strategi yang dikembangkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Thorik, 2020):

- a. Gerakan masker untuk semua. Pemerintah terus mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di luar rumah atau di ruang publik.
- b. *Contact tracing* atau penelusuran kontak kasus positif yang dirawat menggunakan rapid test atau tes cepat.

- c. Edukasi dan persiapan isolasi mandiri pada beberapa hasil tracing yang menunjukkan hasil rapid test positif atau negatif dengan gejala isolasi mandiri.
- d. Isolasi Rumah Sakit dilakukan apabila isolasi mandiri tidak memungkinkan, seperti apabila terdapat gejala klinis yang memerlukan pelayanan rumah sakit definitif.

Kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah upaya pencegahan penyebaran virus corona belum dilakukan secara maksimal. Masyarakat semakin mengabaikan protokol kesehatan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Sementara itu, pemerintah berjuang dengan upaya 3T – meningkatkan pengujian, penelusuran, dan pengobatan (Ulya, 2020).

- 1. *Testing* adalah pengecekan kesehatan melalui rapid test dan tes swab.
- 2. *Tracing* adalah penelusuran kontak kasus positif.
- 3. *Treatment* adalah perawatan dengan benar apabila merasakan gejala Covid-19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Diantaranya bantuan langsung kepada keluarga miskin desa dan dana desa yang dapat digunakan untuk kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19. Ketentuan pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut (Shandi & Iskandar, 2020 dalam Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)):

- a) BLT dianggarkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sifat kedaruratan, penanggulangan bencana, kedaruratan, dan biaya tak terduga di subsektor perdesaan.
- b) Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01.
- c) Penetapan dan penargetan penerima BLT, mekanisme penyaluran dana desa ke APBD, persentase BLT yang diambil dari dana desa, waktu penyaluran dan nilai nominal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

d) Penyaluran BLT dari APBD dapat berupa uang tunai atau non tunai (melalui transfer antar bank atau non tunai atau layanan pengiriman uang pemerintah lainnya) kepada penerima BLT, yang diatur lebih lanjut oleh Kabupaten. / Dewan Kota. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan cara penyampaian BLT kepada penerima. Ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya luar biasa. Tanpa kebijakan pendidikan sosial yang tepat, ketakutan dan kepanikan di kalangan kelas menengah ke bawah akan terus berlanjut. Informasi yang tidak terkendali dan ketidakmampuan untuk meyakinkan masyarakat tentang Covid-19 memutus rantai penyebaran dan mencerminkan kurangnya perubahan sikap dan perilaku.

2.3. Kerangka Pikir

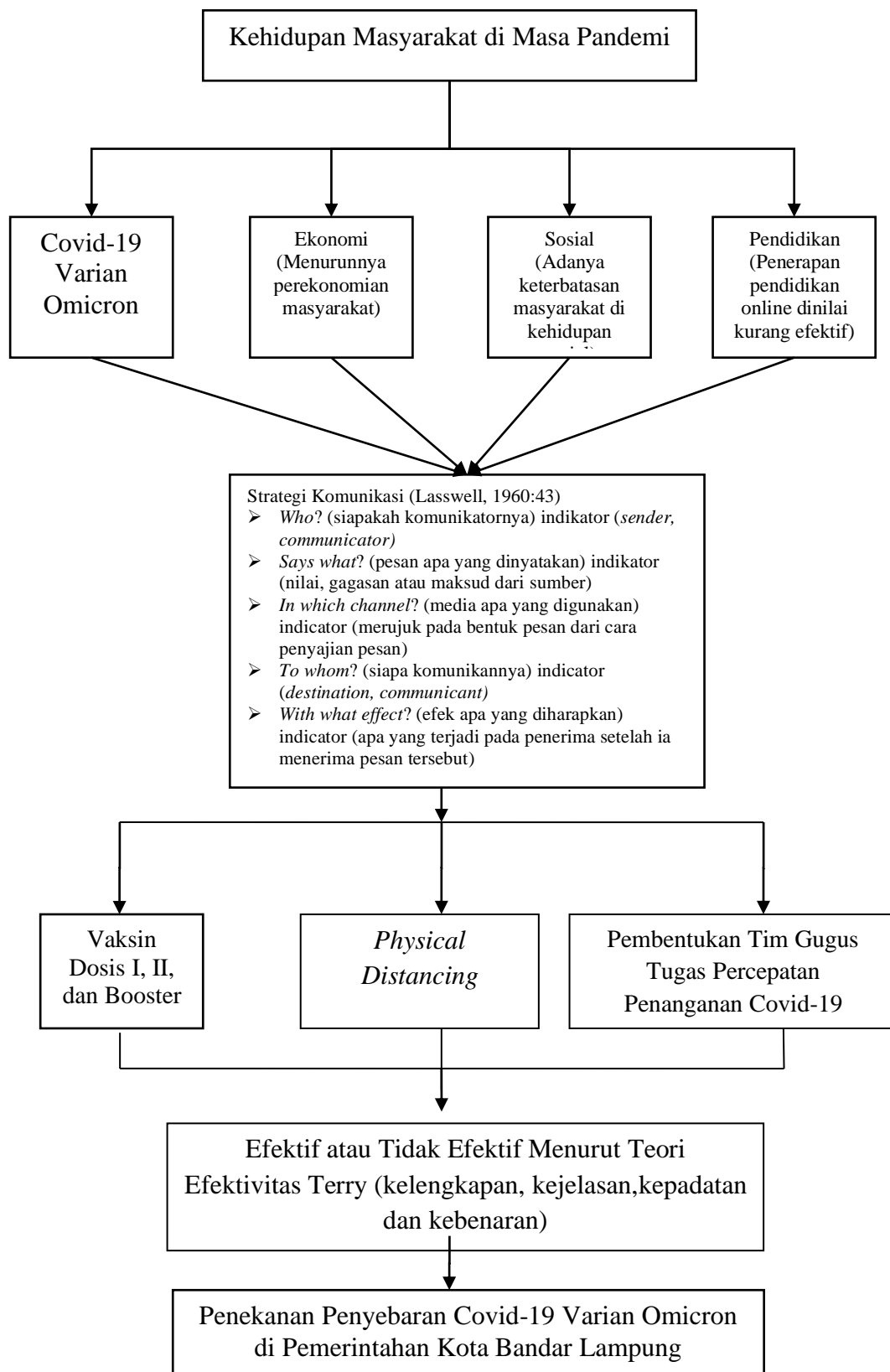
Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga kondisi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini membuat beberapa pemerintah daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kebijakan yang berimplikasi pada kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan. kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Menurunnya kegiatan tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama yang rentan dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah baik di pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini. Oleh karena itu, implementasi berbagai kebijakan tersebut perlu dipantau dan diketahui efektifitasnya

Dampak negatif Covid-19 terhadap pendidikan, yaitu terganggunya pembelajaran dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sehingga mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendadak dengan cara meliburkan atau menggantikan sistem pembelajaran yang awalnya di sekolah menjadi dirumah.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Laswell (1960), cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: *who, says what, in which channel, to whom, with*

what effect atau siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana.

Masyarakat masih menyesuaikan diri dengan penerapan kehidupan *new normal* di masa pandemi. Tentu saja sulit karena sebelumnya jarang menggunakan masker dan minum vitamin. Untuk itu, kurangnya disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan yang dianggap wajar karena tiba-tiba diterapkan secara tegas. Namun, masih ada orang yang tidak memiliki kemauan untuk mengikuti prokes. Padahal, pendidikan prokes sangat aktif dilakukan di berbagai media. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum percaya dengan Covid-19 dan termakan oleh berita hoax. Dalam penelitian ini, bagaimana pola komunikasi pemerintah daerah menjelaskan tentang bentuk komunikasi pada masyarakat di Provinsi Lampung khususnya klaster percepatan pencegahan wabah corona varian omicron di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori pendekatan yang dijelaskan dalam kerangka berikut :



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk menjawab suatu masalah secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, yang dilakukan secara wajar dan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara pada dasarnya saling melengkapi. Selain itu penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mencari data sedalam dalamnya atas hal hal tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk analisis strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanganan Covid-19 varian omicron karena memberikan gambaran yang jelas dan lengkap untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk mendapat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat fenomena yang telah diteliti.

3.2. Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana Informan ini diharapkan memiliki data secara objektif, netral dan dapat memberikan kepuasan. Informan dari penelitian terkait strategi komunikasi pemerintah kota bandar lampung dalam penanganan Covid-19 varian omicron. Informan tersebut terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah, Satgas Covid-19, Puskesmas, dan Masyarakat.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Instansi	Informan	Alasan
1.	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Sukarma Wijaya	Untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah kota Bandar Lampung dalam upaya penanganan covid-19 varian omicron.
2.	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Budi Ardiyanto, S.T., M.M.)	Untuk mengetahui pencegahan dan pengendalian penyakit virus covid-19 varian omicron Dinkes Kota Bandar Lampung untuk menekan penyebaran
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Yahya	Untuk mengetahui pencegahan dan pengendalian penyakit virus covid-19 varian omicron RSUD Kota Bandar Lampung untuk menekan penyebaran
4.	Kepala BPBD Bandar Lampung	Akrom	Untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah BPBD Bandar Lampung kepada masyarakat dalam penanganan covid-19 varian omicron
5.	Satgas Covid	Yusnadi Ferianto (ketua satgas covid 19)	Untuk mengetahui strategi komunikasi pemerintah Satgas Covid-19 Bandar Lampung kepada masyarakat dalam penanganan covid-19

			varian omicron
6.	Puskesmas	Irawati (Kader Puskesmas bagian pencegahan Covid)	Untuk mengetahui pencegahan dan pengendalian penyakit virus covid-19 varian omicron Puskesmas Kota Bandar Lampung untuk menekan penyebaran
7.	Masyarakat	Fauzi dan Wirawan	Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat mengenai strategi komunikasi pemerintah dalam upaya penanganan covid-19 varian omicron dikarenakan dua masyarakat tersebut pernah terinfeksi covid-19 omicron

3.3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam upaya komunikasi pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pencegahan Covid-19 yaitu strategi komunikasi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 varian omicron di Kota Bandar Lampung menggunakan strategi komunikasi Lasswell (1960) *Who?* (siapa komunikatornya) indikator (*sender, communicator*), *Says what?* (pesan apa yang dinyatakan) indikator (nilai, gagasan atau maksud dari sumber), *In which channel?* (media apa yang digunakan) indicator (merujuk pada bentuk pesan dari cara penyajian pesan), *To whom?* (siapa komunikannya) indicator (*destination, communicant*) dan *With what effect?* (efek apa yang diharapkan) indicator (apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut)

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak atau responden yang benar-benar berkompeten dan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian yaitu dari informan penelitian yang terdiri

dari Sekda Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandar Lampung, Salah Satu Pegawai RSUD kota Bandar Lampung, Kepala BPBD Bandar Lampung, Salah Satu Pegawai Satgas Covid, Pihak Puskesmas dan Pihak Masyarakat.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari instansi yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dan instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung (berkomunikasi secara langsung) kepada informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam wawancara terjadi proses interaksi antara pewawancara dengan informan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi teknik wawancara serta untuk meningkatkan keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengecekan keabsahan data.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat

dirumuskan seperti yang disarankan oleh data (Sugiyono, 2016:82). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: 1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian data (data view). 3). Penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing and verifi kasi kesimpulan) (Pawito, 2007:67).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama melibatkan langkah-langkah mengedit, mengelompokkan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode dan catatan tentang berbagai hal, termasuk kegiatan dan proses sehingga peneliti dapat menemukan tema, kelompok, dan pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yaitu penyajian data (data display) menyangkut langkah-langkah dalam pengorganisasian data yaitu menjalin (mengelompokkan) satu data dengan (mengelompokkan) data lainnya sehingga semua data yang dianalisis benar-benar terlibat dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya bervariasi. perspektif dan terasering yang tumpang tindih, sehingga penyajian data (data display) secara umum diyakini sangat beragam untuk membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir yaitu penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya menerapkan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola dan atau kecenderungan data yang ada dalam penyajian data yang telah dibuat.

3.7. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang merupakan gabungan dari berbagai kumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil dengan wawancara dan membandingkan hasilnya dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Dalam hal diperoleh dengan wawancara, kemudian diperiksa dengan dokumen. Jika teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka lakukan diskusi lebih lanjut dengan responden terkait atau orang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Profil Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332/km², Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Secara geografis, Kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa (berdasarkan hasil sensus penduduk 2020). Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung.

Sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Secara geografis, Telukbetung berada di selatan Tanjungkarang, karena itu di markah jalan, Telukbetung yang dijadikan patokan batas jarak ibu kota provinsi. Telukbetung, Tanjungkarang dan Panjang (serta Kedaton) merupakan wilayah tahun 1984 digabung dalam satu kesatuan Kota Bandar Lampung, mengingat ketiganya sudah tidak ada batas pemisahan yang jelas. Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan mengalami

beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali kota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

Seiring perkembangan, kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak cukup tinggi sejak lima tahun terakhir (2010-2015). Pertumbuhan bahkan mencapai 1,1 persen per tahun, dengan penduduk Bandar Lampung yang membengkak dari 800.000 jiwa menjadi 1,2 juta jiwa. Hal itu mulai memicu pertumbuhan kota ini ke arah barat hingga Gedong Tataan; ke timur hingga Tanjung Bintang dan Bergen; serta ke utara hingga Kecamatan Natar. Pada tahun 1986-1989, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum telah merancang konsep pengembangan Kota Bandar Lampung yang disebut *Bandar Lampung and Surrounding Area* (Blasa). Konsep ini meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Natar, Tanjung Bintang, dan Katibung bagian utara. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Studi Penyusunan Masterplan Transportasi Aglomerasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 menyebutkan bahwa ketergantungan antar daerah telah menyatukan interaksi masyarakat dan kegiatan ekonomi antar daerah seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran. Aglomerasi ini diberi nama Balamekapringtata (Bandarlampung, Metro, Kalianda (Lampung Selatan), Pringsewu, Gedongtataan (Pesawaran)). Tahun 2015, Bandar Lampung dan Kota

Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpupera) berpotensi sebagai area metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 4. Peta Wilayah Kota Bandar Lampung



Sumber: Bandarlampungkota.go.id, 2022

4.2. Topografi Kota Bandar Lampung

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 700 m dpl. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah barat ke timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan Pulau di bagian selatan.
- b. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara.
- c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian utara, barat, dan timur.
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian maksimum 700 m dpl. Ketinggian dua Kecamatan tersebut lebih tinggi dibanding Kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing 2-5 m dpl. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20 % dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40 %. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 % di antaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 % di antaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

4.3. Virus Covid-19

Berikut ini data Covid-19 Varian Omicron di Kota Bandar Lampung :

Tabel 5. Data Covid 18 Maret 2020-19 Oktober 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	2020	2021	2022
1	Bakung	45	171	124
2	Beringin Raya	45	307	194
3	Campang Raya	33	60	39
4	Gedong Air	60	160	146
5	Kampung Sawah	95	277	163
6	Kebon Jahe	124	296	241
7	Kedaton	126	372	391
8	Kemiling	121	427	275
9	Korpri	39	123	159
10	Kota Karang	92	82	53
11	Kupang Kota	29	141	131
12	Labuhan Ratu	105	486	342
13	Palapa	70	272	167
14	Panjang	98	311	128
15	Pasar Ambon	60	172	171
16	Permata Sukarame	106	139	109
17	Pinang Jaya	109	73	53
18	Rajabasa Indah	110	434	388
19	Satelit	119	566	426
20	Segala Mider	142	340	346
21	Simpur	156	123	70
22	Sukabumi	171	436	261
23	Sukamaju	97	63	47
24	Sukaraja	117	245	291
25	Sukarame	16	533	274
26	Sumur Batu	61	289	119
27	Susunan Baru	52	229	151
28	Way Halim 1	52	398	351
29	Way Kandis	153	679	500
30	Way Laga	95	18	15
31	Way Halim 2	92	362	190
TOTAL		2.790	8.584	6.315

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

DATA PER 18 MAR 2020- 19 OKT 2022	
Total Kasus Covid	17.689
Total Kasus Sembuh	16.800
Total Kasus Meninggal	846
Total Kasus Aktif	43

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Jumlah kasus covid-19 meningkat dari tahun 2020 sebesar 2.790 menjadi 8.584 pada tahun 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 6.315. jumlah total kasus covid sebanyak 17.689, total sembuh 16.800, total meninggal 864, dan kasus aktif 43 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya menurunkan penyebaran kasus covid-19

4.4. Strategi Penanganan Covid-19

Sejak kasus pertama diumumkan, Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan menyiapkan 132 rumah sakit rujukan dengan kapasitas 40.829 tempat tidur untuk fokus menangani pasien Covid-19. Selain itu, tercatat 40.320 dokter spesialis yang disiagakan untuk menangani pasien Covid-19 yang tersebar di 2.877 rumah sakit, baik RS milik pemerintah maupun swasta. Pemerintah terus mencari pengobatan yang tepat bagi pasien korona. Pemerintah memesan 2 juta obat Avigan, menyusul pemesanan 5 ribu obat yang sama sebelumnya. Selain Avigan, pemerintah juga memesan 3 juta Klorokuin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan status tersebut didorong oleh bertambahnya kasus virus korona di tanah air setiap hari. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi virus Corona sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Penetapan ini dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional (BNBP RI, 2020). Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan bencana

nasional yang diakibatkan oleh virus korona dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Adapun Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan menjadi ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat daerah (BNBP RI, 2020).

Pemerintah telah menyiapkan tiga strategi guna menekan angka penyebaran Covid-19. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia (KSP, 2020):

1. Perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran Covid-19. Dimana strategi ini terdiri dari, mendorong perilaku masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan melalui kampanye protokol kesehatan secara sistematis di masyarakat yang melibatkan berbagai kalangan, operasi yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, dan mendorong strategi testing dan tracing yang tepat sasaran.
2. Pembangunan pusat-pusat karantina dan isolasi, yang terdiri dari fasilitas karantina terpusat disediakan untuk pasien asymptomatic dan ringan, sehingga RS tidak penuh dan mencegah penularan dalam keluarga. Kemudian setiap kota yang memiliki jumlah kasus positif tinggi agar menyediakan fasilitas isolasi terpusat yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai untuk penanganan pasien OTG dan gejala ringan.
3. Manajemen perawatan Covid-19, dimana menerapkan protokol standar terapi penanganan pasien. Dalam hal ini Jodi menambahkan Kementerian Kesehatan sudah menyusun bersama 5 organisasi profesi dan tim RS BUMN. Kemudian selanjutnya memastikan setiap RS rujukan memiliki bed capacity, medical supplies dan equipment yang memadai untuk menjalankan protokol tersebut.

Mengutip dari PPID Provinsi Lampung dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 varian Omicron di Provinsi Lampung, yang dipimpin langsung oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kemenkes dalam upaya pencegahan dan pengendalian

kasus varian Omicron. Pencatatan dan pelaporan kasus varian Omicron dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Allrecord TC-19* (NAR).

Sementara itu, pembiayaan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 varian Omicron dan karantina terpusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19 semaksimal mungkin, bahu membahu dengan kerjasama semua pihak. Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi pada Lampung yang sudah dapat mengejar dari urutan terbawah (ranking 34) menjadi urutan tengah atau urutan ke 15 untuk Capaian Vaksinasi Dosis 1 pada akhir Oktober 2021.

Pada akhir Desember tahun 2021 Lampung sudah dapat memenuhi target dalam pencapaian vaksinasi Covid-19 yaitu mencapai lebih dari 70% untuk mencapai dosis 1 dan mencapai lebih dari 60% untuk vaksinasi usia lanjut dan terus berupaya untuk mempercepat terwujudnya kekebalan kelompok (*Herd Immunity*).

"Omicron tidak bisa dihindari karena memang penyebarannya lebih cepat dibanding varian Covid-19 lainnya. Tapi kita semua tidak usah panik, dengan membentengi diri kita dengan vaksinasi Covid-19 secara lengkap dan melakukan booster vaksinasi, serta penerapan Protokol Kesehatan yang ketat, insya Allah kita semua terhindar dari varian Omicron," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Untuk menekan laju penyebaran virus Corona, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan turunan dari PP 21/2020, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Korona Virus Disease 2019 (Yunus & Rezki, 2020).

Kebijakan pembatasan sosial juga didukung dengan empat strategi yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 demi menekan penyebaran pandemi Covid-19 yaitu (Thorik, 2020):

- a. Gerakan masker untuk semua. Pemerintah terus mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di luar rumah atau di ruang publik.
- b. Penelusuran kontak atau tracing contact dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan tes cepat atau rapid test.
- c. Edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari tes cepat atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.
- d. Isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti saat terdapat tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit.

Kasus Covid-19 di Indonesia semakin melonjak dari hari ke hari. Salah satu penyebabnya yaitu upaya pencegahan penularan virus Corona yang belum maksimal. Masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Di sisi lain, pemerintah kesulitan untuk meningkatkan upaya 3T, yaitu *testing*, *tracing*, dan *treatment* (Ulya, 2020).

1. *Testing* adalah pengecekan kesehatan melalui rapid test dan tes swab.
2. *Tracing* adalah penelusuran kontak kasus positif.
3. *Treatment* adalah perawatan dengan benar apabila merasakan gejala Covid-19.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 omicron telah memenuhi teori komunikasi Laswell dan sejalan dengan teori efektifitas strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Terry (1999) yang menyatakan bahwa kunci dari komunikasi yang efektif dikenal dengan 4C, yakni kelengkapan (*completeness*), kejelasan (*clarity*), kepadatan (*conciseness*), dan kebenaran (*correctness*). Strategi ini di himbau untuk di lakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga yang di daerah maupun yang ada di kelurahan. Adapun simpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. *Who?* (siapakah komunikatornya), dalam penelitian ini komunikatornya adalah pemerintah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Covid-19 dan upaya memutus penyebarannya, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung senantiasa melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu mengedukasi masyarakat secara umum dan membentuk program-program yang berbasis kearifan lokal untuk memudahkan pelaksanaan program pemutusan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
2. *Says what?* (pesan apa yang dinyatakan), dalam penelitian ini pemerintah menyampaikan pesan dengan memaparkan secara terperinci gejala virus Corona, cara penanganan, langkah pencegahan serta menyederhanakan istilah-istilah baru terkait penanganan Covid-19 sehingga mudah di mengerti dan di implementasikan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.
3. *In which channel?* (media apa yang digunakan), dalam penyampaian informasi oleh pemerintah, penggunaan media sangatlah penting guna menunjang

terlaksananya implementasi dari sebuah kebijakan. Penyampaian komunikasi kepada masyarakat terkait metode pemutusan penyebaran Covid-19 di Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara selektif. Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah terlebih tidak semua masyarakat dapat mengakses media-media online yang pada dasarnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

4. *To whom?* (siapa komunikannya), sikap masyarakat dalam mengikuti kebijakan pemerintah tergantung dari sejauh mana para aktor pembuat kebijakan juga dapat mengimplementasikan programnya dengan baik. Masyarakat senantiasa menjalankan anjuran dari pemerintah apabila pemerintah itu sendiri juga menjalankan kebijakan yang dibuatnya.
5. *With what effect?* (efek apa yang diharapkan), melaksanakan rapid test secara gratis bagi masyarakat, pelaksanaan vaksin dan gerakan seribu masker adalah sebuah metode yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memutus penyebaran Covid-19 di Kota Bandar Lampung dengan adanya kegiatan tersebut memberikan effect yang signifikan yaitu menurunnya kasus positif covid varian omicron di Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota sangat berperan penting dalam strategi komunikasi untuk penanganan covid-19 ini yang didukung oleh penelitian Hestiana (2020). Strategi Komunikasi Humas Pemkot Dalam Upaya Menanggulangi Kasus Virus Corona (Covid-19) Di Kota Bandar Lampung yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Humas Pemkot Bandar Lampung dalam menjalankan tugas kehumasan sebagai fungsi komunikasi pimpinan juga terlibat dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Melalui perencanaan, pelaksanaan seperti pemilihan komunikator, pengelolaan pesan, pelaksanaan penggunaan dan kegiatan media baik media konvensional maupun media online, serta kegiatan konferensi pers, dan komunikasi baik publik internal yakni pegawai yang bekerja di balaikota serta publik eksternal yakni seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kota Bandar Lampung. Selain itu ada kegiatan evaluasi dimana Humas Pemkot Bandar Lampung mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan khususnya dalam melakukan komunikasi. Humas Pemkot Bandar Lampung berusaha untuk mengkaji ulang apakah strategi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota

Bandar Lampung melalui komunikasi sudah sesuai dan berdampak pada aktivitas masyarakat.

Kesimpulan bahwa strategi merupakan langkah pengambilan keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan yang terdiri dari suatu proses pencapaian tujuan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya dikaitkan dengan pola penanganan virus Covid-19 serta langkah-langkah kongkrit yang diambil pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di era new normal untuk pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam penangan Covid-19 sudah sangat baik peranannya, efektif dan berdampak pada aktivitas masyarakat.

6.2. Saran

1. Setelah melakukan penelitian peneliti menyarankan dalam penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat belum maksimal, karena penggunaan media masih terbatas terutama kalangan lansia yang kurang memiliki akses internet.
2. Peneliti menyarankan edukasi mengenai vaksin perlu ditingkatkan karena masih ada masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksin bahkan masyarakat beranggapan bahwa vaksin memiliki effect samping.
3. Pemerintah daerah khususnya Kota Bandar Lampung dituntut lebih tanggap dan inovatif dalam melaksanakan strategi pencegahan Covid-19, mengingat masyarakat yang ada di wilayah Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, tentunya perlu juga pendekatan-pendekatan yang berbeda. Sehingga jika penanganan Covid-19 sebelumnya dilakukan melalui keputusan pemerintah pusat,seharusnya pemerintah daerah juga mempunyai strategi khusus dalam menentukan program penanganan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, A. (2008). *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, S. (2011). *Sikap dan Perilaku Dalam: Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bintoro, T. (1988). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, B. (2015). *Komunikasi Pariwisata (Tourism Communication): Pemasaran dan Brand Destinasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Rajawali Pers.
- Djopari, J. R. G., & Solihah, R. (2014) *Pengantar Ilmu Pemerintahan. In: Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-53. ISBN 978979011385.
- Fadhal. S. (2020). *Kolaborasi Lawan (HOAKS) Covid-19: Hambatan Komunikasi dan Budaya dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19*. Yogyakarta : Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM.
- Hamad. Ibnu. (2010). *Komunikasi Sebagai Wacana*. Jakarta: La Tofi Enterprise
- Herlina, D. (2016). *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta.
- Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley. (1953). *Communication and persuasion*. New Haven: Yale University Press
- Huang C, W. Y. (2020). *Clinical Features of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China*. China: Lancet.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*. Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit: Jakarta
- Lasswell, H. (1960). *The Structure and Function of Communication In Society*. Urbana: University of Illinois Press.

- Made, W. (2010). *Strategi Pembelajaran Inovatif kontemporer*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, A. (2008). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Ponco, D. (2018). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.
- Sulhan. (2020). *Komunikasi Empati Dalam Pandemi Covid 19*. Jawa Timur: Aspikom.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Venus, A. (2009). *Manajemen Kampanye*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.

Jurnal :

- Aftriana, F. N. (2017). Strategi Komunikasi Visual Billboard Erha Clinic Dalam Meningkatkan Minat Konsumen. *Thesis, PERPUSTAKAAN*. Vol. 1, No.1.
- Almuttaqi, A. (2020). Kekacauan Respons Terhadap Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 1-7.
- Anneliese Depoux, E. K. (2020). The Pandemic Of Social Media Panic Travel Faster than the Covid-19 Outbreak. *Journal of Travel Medicine*, 2-3.
- Auliana, R. (2012). Pengaruh Komunikasi Non Verbal Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Vol. 12, No. 1, Hal. 1-7*
- BNBP RI. (2020). Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. *Jurnal Berkala Kesehatan. BNPB:Jakarta*
- Cahyono, A. (2018). Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Dalam Upaya Penghimpun Dana Umat di Kalimantan Tengah. (*Jurnal*), Vol. 4, No. 1.
- Dewita, H. Y. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*. Vol. 1, No. 2, Hal. 208-213
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. *In Manajemen Sumber Daya Manusia*. Vol. 2, No. 1, Hal. 56-71
- Effendy, O. U. (2005). *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Ekalista, P. d. (2019). Strategi Komunikasi Pemasaran Hotel Kartika Graha Malang Dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung . *Jurnal Komunikasi Nusantara, Vol.1, No.1*, 18-24.
- Fakhruroji, M., Tresnawaty, B., Sumadiria, A. S. H., Risdayah, E., & Kunci, K. (2020). Strategi Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 di Indonesia : Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa dan Agama. *Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 6, No. 2, Hal. 1-10*
- Fiandana, Y. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya. Vol. 3, No. 10, Hal. 1729*
- Fitria, L. &. (2020). Kecemasan remaja pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal EDUCATIO : Pendidikan Indonesia, 6(1)*.
- Fitria, L., & Ifdil, I. (2020). Kecemasan Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) 6(1):1-4*.
- Gennaro, F. D., Pizzol, D., dkk. 2020. Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives : A Narrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2690*.
- Handayani, D. et.al. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respiriologi Indonesia. Vol 40. No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia*
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas, No.1*
- Kosasih, D. H. A. (2013). Konsep Masyarakat Madani. *Sosial. Vol. 12, No. 2, Hal. 1-17*
- Kumar. A, dkk. Dealing with Corona virus anxiety and OCD. 2020. *Asian: Journal of Psychiatry*.
- Lapostolle, et al. 2020. Clinical Features of 1487 COVID-19 Patients with Outpatient Management in the Greater Paris : the COVID - Call Study. *Internal and Emergency Medicine, (0123456789)*. <https://doi.org/10.1007/s11739-020-02379-z>
- Latif. 2020. Peran Komunikasi Massa di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal of Communication. Vol 2 No. 1: https://core.ac.uk/download/pdf/328152364.pdf*.
- Limilia, P., & Pratamawaty, B. B. 2020. Google Trends and information seeking trend of covid-19 in Indonesia. *Jurnal ASPIKOM 5 (2), 188-205*
- Mardikantoro, H. B., & Santoso, B. W. J. (2017). Korupsi Dalam Konstruksi Media: Analisis Tekstual Pemberitaan Korupsi di Televisi Swasta Nasional Indonesia Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis Van Dijk. *PIBSI, November, 269-285*.

- Mona, N. (2020). Konsep isolasi data jaringan sosial untuk meminimalisasi efek contagious (Kasus penyebaran virus corona di Indonesia). *Sosial humaniora terapan*, 117-125 Vol 2 No 2.
- Muhyadi, M. (2015). Teknik Pengambilan Keputusan. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi. Vol.13, No.2, Hal.98-110*
- Mulawarman, K., & Rosilawati, Y. (2014). Komunikasi Organisasi Pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna.. Vol. 5, No.1, Hal. 31-41*
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol. 9, No. 2, Hal. 1-10*
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 1, No. 2, Hal. 96-108*
- Purworini, D. (2014). Model Informasi Publik di Era Media Sosial : Kajian Grounded Teori Di Pemda Sukoharjo. *KomuniTi: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi. Vol. 6, No. 1, Hal. 3-14.*
- Putsanra, D. V. (2020). Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia. *Tirto.id : Jakarta.*
- Rika, O., & Eka, W. W. (2020). Komunikasi Pemerintah Melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepada Publik. *EXPOSE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah : Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformative. Vol.5, No.3, Hal.1-7.*
- Sabir, A., & Phil, M. (2016). Gambaran Umum persepsi masyarakat terhadap bencana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 5(3), 304-326.
- Sapril. (2011). Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Manajemen Komunikasi, Vol. 5, No.1.*
- Sarmigi, E. (2020). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Al-Dzahab, Vol. 1, No.3.*
- Seta, P. M. (2014). *Strategi Komunikasi PT. Kaha Event Management dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan.* Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Shandi, H. K., & Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Jurnal Bisnis Net Volume : 3 No. 2*
- Soewarno. (2011). Masyarakat. *Tetrahedron Letters. Vol.52, No.8, Hal. 867-871*

- Sucahya, M. (2013). Teknologi Komunikasi Dan Media. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 2, No. 1, Hal. 6-21
- Sulistiyowati, F., & Hasanah, N. U. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(2), 198-214.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*. Vol.4, No.1, Hal.1-9.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*. Vol.3, No.2, Hal. 267-278
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 3, No. 1, Hal.80-109
- Yunus, N. &. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 . *Jurnal SALAM : Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No.3, 1-20.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948
- Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1965
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Website:

- [Covid19.lampungprov.go.id](https://covid19.lampungprov.go.id), 2022
- Sumber: [Bandarlampungkota.go.id](https://bandarlampungkota.go.id), 2022